

## UPAYA GENCATAN SENJATA GLOBAL DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Rizki Roza

### Abstrak

*Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di hadapan Pertemuan DK PBB mengingatkan kewajiban moral DK PBB untuk melindungi warga sipil di wilayah konflik di masa pandemi. Retno menekankan pentingnya pemberlakuan jeda kemanusiaan. Pernyataan ini disampaikan untuk merespons konflik bersenjata yang masih berlangsung di tengah pandemi, dan sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap seruan Sekjen PBB untuk memberlakukan gencatan senjata secara global di masa pandemi. Tulisan ini menggambarkan arti penting gencatan senjata dan upaya masyarakat internasional untuk mewujudkannya. Bagi penduduk rentan di wilayah konflik, bantuan kemanusiaan merupakan kebutuhan mendesak untuk menghadapi pandemi, dan hanya mungkin diperoleh jika tercapai gencatan senjata. Gencatan senjata juga akan membuka peluang bagi dialog-dialog menuju penyelesaian konflik yang sesungguhnya. Dukungan internasional dibutuhkan untuk menjaga komitmen gencatan senjata dari pihak-pihak yang bertikai. Sebagai anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia harus dapat berperan aktif untuk mendukung dan menjaga gencatan senjata, dan lebih jauh mendorong proses perdamaian yang berkelanjutan.*

### Pendahuluan

Pada 27 Mei lalu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) mengadakan Pertemuan Terbuka Tingkat Tinggi mengenai Perlindungan Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata. Di hadapan forum itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi menyampaikan pernyataan tegas bahwa DK PBB memiliki kewajiban moral untuk melindungi warga sipil di wilayah konflik di tengah pandemi Covid-19. Menlu Retno menekankan

pentingnya pemberlakuan jeda kemanusiaan guna menjawab tantangan perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata di tengah masa pandemi.

Pernyataan Menlu Retno tersebut didorong oleh keadaan di mana sejumlah konflik bersenjata di berbagai belahan dunia masih terus berlangsung, sementara pada saat bersamaan semua pihak sedang berjuang menghadapi ancaman pandemi Covid-19. Ini juga merupakan bentuk dukungan



Indonesia terhadap seruan Sekjen PBB untuk melakukan gencatan senjata global di seluruh situasi konflik. Tidak hanya Indonesia, banyak pihak yang telah menyatakan dukungannya terhadap seruan Sekjen PBB, baik dari negara-negara anggota PBB, organisasi internasional, kelompok sipil, para diplomat, dan bahkan dari beberapa kelompok bersenjata yang terlibat konflik. Mengapa gencatan senjata menjadi penting di tengah masa pandemi Covid-19 ini? Bagaimana upaya yang telah dijalankan masyarakat internasional? Tuliskan singkat ini akan menjelaskan dua hal tersebut, dengan terlebih dahulu menggambarkan kondisi yang dihadapi penduduk sipil di wilayah konflik di masa pandemi ini.

### **Pandemi di Wilayah Konflik**

Penduduk sipil di wilayah konflik, terutama perempuan dan anak-anak, penyandang disabilitas, serta para pengungsi, merupakan pihak yang paling menderita akibat perang. Perang, teror, dan kemiskinan yang ditimbulkannya telah mendesak kelompok rentan ini untuk meninggalkan rumah dan menetap di tempat-tempat pengungsian. Penderitaan penduduk sipil di wilayah terdampak konflik, terutama kelompok rentan, akan semakin berat ketika mereka harus menghadapi ancaman pandemi Covid-19.

Oxfam, organisasi yang fokus pada penanggulangan bencana dan advokasi, mencatat bahwa terdapat jutaan penduduk yang hidup di wilayah terdampak konflik yang harus menghadapi pandemi dengan resiko terpapar yang sangat tinggi (Oxfam, Mei 2020). Mereka adalah penduduk yang hidup di wilayah

dengan keterbatasan sistem dan fasilitas kesehatan yang rusak akibat perang, ataupun yang terusir dari tempat tinggal dan hidup di tempat pengungsian yang padat dan minim layanan kesehatan.

Pandemi Covid-19 tidak menghentikan konflik bersenjata di berbagai belahan dunia. Di Filipina, pada akhir Maret kelompok pemberontak komunis yang telah lebih dari 50 tahun bertikai dengan pemerintah Filipina menyatakan gencatan senjata. Presiden Filipina juga telah menyatakan gencatan senjata unilateral agar negara dapat fokus pada upaya penanganan pandemi. Namun ketegangan kembali meningkat setelah Presiden Duterte menuduh kelompok komunis membunuh dua serdadu yang mengawal penyaluran batuan pangan pada 22 April. Duterte bahkan mengancam akan memberlakukan darurat militer untuk menumpas habis kelompok pemberontak.

Yaman, negara miskin yang disebut PBB sebagai negara yang mengalami bencana kemanusiaan terburuk di dunia, mendapat kesempatan untuk mengupayakan perawatan dan pencegahan penyebaran virus corona setelah Arab Saudi pada 9 April mengumumkan gencatan senjata sepihak dalam perang melawan kelompok pemberontak Houthi di Yaman. Organisasi-organisasi kemanusiaan telah mengingatkan bahwa jika virus corona menerpa sistem kesehatan Yaman yang rusak akibat perang, dampaknya bisa menjadi bencana besar. Gencatan senjata sangat penting untuk memberi ruang bantuan kemanusiaan demi menyelamatkan penduduk rentan di Yaman.

Kondisi berbeda terlihat di Myanmar di mana pihak militer

Myanmar, Tatmadaw, terus meningkatkan serangan terhadap kelompok etnis bersenjata di Rakhine, China, Karen dan Shan bagian utara. Meskipun kelompok-kelompok bersenjata telah mengajukan gencatan senjata agar dapat fokus memerangi pandemi, dan adanya desakan dari masyarakat internasional, konflik bersenjata tetap berlangsung di Myanmar. Dengan sistem pelayanan kesehatannya yang lemah, kerentanan penduduk yang terdampak konflik di Myanmar menjadi kekhawatiran banyak pihak.

Bantuan kemanusiaan, terutama untuk menghadapi risiko penyebaran Covid-19 menjadi kebutuhan mendesak bagi mereka yang berada di wilayah konflik. Tidak hanya bagi Filipina, Yaman, atau Myanmar, gencatan senjata adalah langkah penting untuk menangani pandemi dan memastikan bantuan kemanusiaan, termasuk penyediaan layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi dapat mencapai semua orang di wilayah konflik. Gencatan senjata juga berarti upaya untuk mencegah virus corona menginfeksi jutaan penduduk di wilayah konflik yang tidak memiliki akses pada layanan kesehatan atau tidak memiliki kesempatan untuk sekedar menerapkan *social distancing*, serta untuk mencegah lebih banyak orang terpaksa meninggalkan rumahnya akibat perang. Kerusakan infrastruktur vital seperti fasilitas kesehatan juga dapat dihindari.

Meskipun upaya gencatan senjata di tengah masa pandemi terutama ditujukan untuk memungkinkan penyediaan pelayanan kesehatan dan bantuan kemanusiaan bagi penduduk sipil di wilayah terdampak konflik, jika diikuti dengan proses dialog lebih luas akan menjadi pondasi penting bagi proses penyelesaian konflik yang

berkelanjutan. Jadi gencatan senjata yang berhasil dicapai harus juga dimanfaatkan untuk membangun dialog yang lebih mendalam antara pihak-pihak yang berkonflik.

Sejarah mencatat bahwa bencana alam skala besar, seperti tsunami yang melanda Asia pada 2004, pernah menghasilkan kondisi yang memungkinkan upaya perdamaian di beberapa wilayah yang terdampak tsunami, demikian pula hendaknya dengan pandemi ini. Gencatan senjata di Yaman yang merupakan terobosan pertama sejak pihak yang bertikai menyetujui gencatan senjata pada akhir 2018, diharapkan meningkatkan peluang terjadinya dialog menuju penyelesaian konflik, dan menjadi harapan dialog menuju perdamaian juga dapat terjadi di wilayah konflik lainnya.

### **Upaya Gencatan Senjata**

Tidak sedikit konflik bersenjata di dunia saat ini yang telah berlangsung berkepanjangan dan telah mengakar sehingga sulit mencapai solusi damai. Konflik ini juga diperburuk dengan adanya keterlibatan negara tertentu yang memberi dukungan pada pihak-pihak yang bertikai, termasuk dengan memberi bantuan persenjataan. Bahkan keterlibatan kekuatan-kekuatan besar tidak jarang menyebabkan DK PBB gagal untuk menyetujui resolusi ataupun sikap bersama untuk mendesak penyelesaian konflik.

Seruan gencatan senjata yang disampaikan Sekjen PBB pada 23 Maret dapat dilihat sebagai upaya untuk menemukan peluang perdamaian di tengah pandemi Covid-19. Sekjen PBB Antonio Guterres menyerukan

pihak-pihak yang bertikai di seluruh penjuru dunia untuk meletakkan senjata dan bersama-sama fokus pada penanganan pandemi Covid-19. Himbauan Guterres diharapkan menciptakan momentum penghentian kekerasan guna membantu respons terhadap pandemi, dan dapat menjadi awal membangun kepercayaan yang dibutuhkan untuk upaya kesepakatan damai jangka panjang.

Menindaklanjuti seruan Sekjen PBB, Perancis dan Tunisia mengajukan proposal resolusi DK PBB untuk mendesak gencatan senjata secara global. Dibahas selama hampir dua bulan, resolusi ini berupaya untuk mendorong dilakukannya jeda kemanusiaan setidaknya selama 90 hari agar masyarakat internasional dapat memberikan bantuan pada mereka yang menderita di wilayah konflik dan yang paling rentan terhadap pandemi Covid-19. Rancangan resolusi gugur ketika pada 8 Mei, AS tiba-tiba menghambat rencana voting terkait resolusi gencatan senjata tersebut. Pertentangan pendapat antara AS dan China menjadi faktor penghambat terwujudnya resolusi itu. AS dan China saling menuduh satu sama lain bahwa masing-masing telah mencoba menghalangi tercapainya konsensus sejak awal.

Meskipun selanjutnya Jerman dan Estonia mencoba mengajukan lagi rancangan resolusi yang menyempurnakan dan lebih sederhana dari draft sebelumnya, kegagalan ini telah mengecewakan banyak pihak. Kondisi ini direspons banyak pihak dengan melihat DK PBB, sebagai badan perdamaian dan keamanan global, tidak berperan apapun di tengah pandemi yang telah merenggut ratusan ribu nyawa

dan menempatkan penduduk di wilayah konflik menjadi yang paling rentan. Oxfam bahkan menyebut gagalnya resolusi tersebut sebagai sebuah bencana. Pandemi yang membahayakan seluruh bangsa tanpa terkecuali bahkan belum mampu memaksa negara-negara tertentu di DK PBB untuk mengesampingkan kepentingan individualnya. Kegagalan ini kembali menunjukkan sulitnya DK PBB untuk bersatu menghadapi persoalan yang berdampak global sekalipun.

Sebagaimana telah disampaikan pada bagian sebelumnya, pandemi Covid-19 seharusnya dapat menjadi momentum perdamaian. Banyak pihak yang telah menyatakan dukungannya terhadap seruan gencatan senjata Sekjen PBB, termasuk dari pihak yang bertikai. Namun perlu juga menjadi perhatian bahwa motivasi masing-masing pihak tersebut berbeda-beda, tidak sepenuhnya menginginkan penyelesaian konflik dan perdamaian.

*International Crisis Group* (ICG) berpandangan bahwa motivasi dan kepentingan yang mendasari sebagian besar konflik adalah persoalan yang bersifat spesifik dan terkait isu lokal ([www.crisisgroup.org](http://www.crisisgroup.org), April 2020). Meskipun tidak dapat dipungkiri kepentingan-kepentingan pihak eksternal seringkali memperburuk permusuhan. ICG meyakini, persoalan-persoalan yang telah mengakar, yang memicu kelompok-kelompok kepentingan bertikai tidak akan hilang hanya dengan menerapkan himbauan Sekjen PBB. Untuk itu, agar dapat berdampak bagi kehidupan penduduknya, gencatan senjata harus bersumber dari *political will* dan dihasilkan dari

negosiasi inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan lokal.

Ketakutan terhadap pandemi Covid-19 dapat menjadi faktor pendorong negara dan kelompok bersenjata untuk mengikuti himbauan gencatan senjata Sekjen PBB. Namun hanya keuntungan yang mereka peroleh dari gencatan senjata itu yang dapat mendorong mereka untuk menjaga komitmennya, bukan himbauan masyarakat internasional, ataupun desakan kekuatan eksternal. Di sini lah dukungan internasional menjadi bagian penting untuk mewujudkan dan menjaga gencatan senjata global, termasuk adanya resolusi DK PBB yang memberi jalan tersalurkannya bantuan bagi penduduk rentan yang sangat membutuhkan.

Dukungan internasional, termasuk resolusi DK PBB, dibutuhkan untuk memastikan mobilisasi sumber daya yang memadai dan dapat disalurkan segera. Akses terhadap kebutuhan dasar dan pelayanan kesehatan di tengah pandemi Covid-19 ini akan sangat berarti bagi kelompok-kelompok bertikai guna menjaga penduduk yang menjadi basis pendukungnya dari ancaman pandemi, termasuk kelompok lain yang terdampak konflik.

Perlu menjadi catatan pula bahwa gencatan senjata hanya akan berarti bagi penduduk rentan di wilayah konflik jika gencatan senjata diterapkan di lapangan, tidak hanya berupa negosiasi di tataran elit yang bertikai. Sebaliknya, gencatan senjata di lapangan akan menghasilkan ruang dialog bagi kelompok yang bertikai.

### **Penutup**

Pandemi Covid-19 masih menjadi ancaman besar bagi keselamatan,

serta perdamaian dan keamanan dunia. Di wilayah konflik, pandemi ini menyebabkan penderitaan yang lebih buruk pada sebagian penduduk yang hidup di lingkungan dengan resiko terpapar virus yang sangat tinggi dengan keterbatasan sistem dan fasilitas kesehatan yang hancur akibat perang. Bantuan kemanusiaan, terutama untuk menghadapi pandemi Covid-19, menjadi kebutuhan mendesak di wilayah konflik, dan hanya dapat disalurkan dengan baik jika tercapai gencatan senjata. Selain itu, dari uraian di atas diketahui juga bahwa gencatan senjata berpotensi membuka peluang dilanjutkannya kembali dialog-dialog untuk mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan.

Kegagalan DK PBB menghasilkan resolusi tidak boleh melemahkan dukungan masyarakat internasional terhadap upaya gencatan senjata global yang diserukan Sekjen PBB. Pentingnya dukungan internasional, terutama untuk memastikan tersedianya bantuan kemanusiaan bagi kelompok rentan di wilayah konflik demi menjaga komitmen gencatan senjata dari pihak-pihak yang bertikai perlu menjadi perhatian semua pihak, termasuk Indonesia. Meskipun bukan merupakan kekuatan besar, sebagai salah satu anggota tidak tetap DK PBB Indonesia semestinya dapat memainkan peranan penting. Dengan memanfaatkan segala sumber daya diplomasi, Indonesia harus mampu berperan lebih aktif untuk mendorong tercapainya gencatan senjata di seluruh wilayah konflik dan mendorong lebih banyak pihak untuk berkomitmen memberi bantuan kepada kelompok rentan di wilayah konflik.

## Referensi

“Ceasefire during COVID-19 pandemic essential, to safeguard 250 million children”, <https://news.un.org/en/story/2020/04/1061962>, diakses 1 Juni 2020.

“International Crisis Group, Global Ceasefire Call Deserves UN Security Council’s Full Support”, <https://www.crisisgroup.org/global/global-ceasefire-call-deserves-un-security-councils-full-support>, diakses 1 Juni 2020.

Jim Gomez, “Philippines: Communist Rebels Declare Ceasefire Amid Coronavirus Pandemic”, <https://thediplomat.com/2020/03/philippines-communist-rebels-declare-ceasefire-amid-coronavirus-pandemic/>, diakses 1 Juni 2020.

“Myanmar military steps up attacks as coronavirus spreads”, <https://www.aljazeera.com/news/2020/04/myanmar-military-steps-attacks-coronavirus-spreads>, diakses 1 Juni 2020.

Oxfam, “Conflict in the Time of Coronavirus”, Oxfam Briefing Paper - May 2020, <https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620983/bp-conflict-coronavirus-global-ceasefire-120520-en.pdf>, diakses 1 Juni 2020.

“US withdraws support for UN Security Council global ceasefire resolution”, <https://www.france24.com/en/20200509-us-withdraws-support-for-un-security-council-global-ceasefire-resolution>, diakses 1 Juni 2020.



Rizki Roza  
[rizki.roza@dpr.go.id](mailto:rizki.roza@dpr.go.id)

Rizki Roza, S.Ip., M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2003 dan pendidikan S2 Hubungan Internasional Universitas Indonesia pada tahun 2007. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Confidence Building Measures dan Program nuklir Iran” (2010); “Konflik Laut China Selatan dan implikasinya terhadap modernisasi militer” (2013); dan “Kerjasama internasional dan Peran industri sipil dalam industri pertahanan” (2013).

## Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.